

ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI**Ni Putu Santi Suryantini; Ni Putu Ayu Darmayanti; Ica Rika Candraningrat**

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

*Email: santisuryantini@gmail.com***ABSTRAK**

Pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk memenuhi prinsip ekonomis, efektif, efisien serta memenuhi prinsip *value for money* baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Kinerja keuangan memperlihatkan posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berkelanjutan. Analisis terhadap kinerja keuangan suatu daerah dapat dilihat dari analisis rasio keuangan daerah diantaranya rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efesiensi, rasio aktivitas serta rasio pertumbuhan. Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan dari pemerintah kabupaten/kota di provinsi Bali periode 2011-2016. Hasil analisis memperlihatkan bahwa daerah kabupaten/kota di Bali memiliki tingkat kemandirian yang beragam, hanya kabupaten Badung, Gianyar, dan Karangasem yang sudah bisa lepas dari pemerintah pusat. Efektivitas daerah di provinsi Bali termasuk efektif. Efisiensi keuangan daerah berada pada kategori tidak efisien. Aktivitas belanja rutin meningkat sedang aktivitas belanja pembangunan menurun, hal ini menunjukkan adanya perbedaan aktivitas daerah terhadap belanja rutin. Pertumbuhan baik terhadap pendapatan maupun belanja berfluktuatif.

Kata Kunci : analisis kinerja keuangan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efesiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan

ABSTRACT

Regional financial management aims to meet the principles of economical, effective, efficient and meet the principles of value for money both in terms of revenue and spending. Financial performance shows the financial position that represents the reality of the entity and the potential performance that will be sustainable. Analysis on the financial performance of a region can be seen from the analysis of financial ratios of areas such as the ratio of independence, effectiveness ratio, efficiency ratio, activity ratio and growth ratio. This study analyzes the financial performance of regency / municipal government in the province of Bali period 2011-2016. The results of the analysis show that the regencies / cities in Bali have varying degrees of independence, only the districts of Badung, Gianyar, and Karangasem that can be separated from the central government. The effectiveness of the region in Bali province is effective. The efficiency of local finance is in an inefficient category. Routine expenditure activities increased while development spending activities decreased, indicating a difference in regional activity to routine spending. Growth for both income and expenditure fluctuated

Keywords: *financial performance analysis, independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, activity ratio, and growth ratio*

PENDAHULUAN

Pemerataan pembangunan di semua daerah di Indonesia merupakan tujuan dari pemerintah yang tertuang dalam UU no 22 tahun 1999, pada tahun 2001 yang mengalami perubahan yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah disempurnakan lagi oleh undang-undang no 32 tahun 2004 serta no 33 tahun 2004 yang nantinya dijadikan landasan utama dalam pengelolaan otonomi daerah, Tujuan pemerintah pusat membuat peraturan adalah untuk menelusuk langsung ke daerah kabupaten/kota, tidak berdasarkan atas daerah provinsi lagi, sehingga dampak kebijakan diharapkan langsung dari pusat ke daerah kabupaten/kota. Perimbangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemda dapat dikatakan ideal apabila setiap tingkat pemerintahan dapat secara

independen mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerahnya masing-masing (Dollery, 2009).

Penyempurnaan peraturan ini memberikan harapan pengurangan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik akan dapat mengelola kekayaannya yang tercermin dari kinerja keuangannya yang diukur dari analisis rasio keuangan (rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas serta rasio pertumbuhan) (Halim, 2008). Mbedzi dan Gondo (2010) menghasilkan ketidakefisienan pada kinerja keuangan dikarenakan penilaian derisory dari sumber pajak, struktur organisasi yang buruk, sistem akuntansi yang tidak memadai, tidak adanya pedoman yang jelas operasional, perencanaan yang buruk dan manajemen data base, kurangnya kesadaran wajib pajak dan kurangnya tenaga kerja terampil.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2011-2016?.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Pemerintah

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran. Penelitian Nasution (2010) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memberikan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja yang digunakan adalah dengan rasio upaya fiskal, yaitu Total Pendapatan Asli Daerah dibagi Total Anggaran Pendapatan Asli Daerah, yang mengindikasikan daerah-daerah tersebut terkadang tidak bisa mencapai Anggaran Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini bisa terjadi, daerah tersebut tidak secara rasional dalam menyusun Anggaran PAD.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan pengertian kinerja sebagai berikut, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja memiliki beberapa tujuan. Secara umum, tujuan pengukuran kinerja (Mardiasmo, 2005:122) adalah mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, mengukur kinerja finansial dan non finansial, mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai kesesuaian tujuan, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional, disamping tujuan, pengukuran kinerja juga memiliki beberapa manfaat.

Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Halim (2008) menyatakan analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan.

Rasio Aktifitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Penelitian Dwirandra (2008), menganalisis tentang efektivitas dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2002-2006 dengan melakukan pengukuran terhadap rasio-rasio keuangan. Erawati (2012), menganalisis kinerja keuangan kawasan Metropolitan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) pada tahun anggaran 2007- 2008 menggunakan rasio-rasio keuangan.

METODELOGI PENELITIAN

Kerangka Konsep

Desentralisasi fiskal akan memberikan peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini menimbulkan konsekuensi yaitu dimana pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal akan memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah ((rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan) sehingga pemerintah daerah dapat mengoptimalkan alokasi belanja modal sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah. Permasalahan timbul ketika daerah sudah dapat meningkatkan kinerjanya tetapi masih belum dapat mengoptimalkan penyerapannya sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak tercapai.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berhubungan dengan kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan) di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah (Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan). Perhitungan masing-masing rasio kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Rasio Kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat / propinsi daerah}} \dots\dots\dots (1)$$

Rasio Efektifitas berdasarkan APBD

Rasio efektifitas = $\frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}}$ (2)

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi diukur dengan: = $\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$ (3)

Rasio Aktifitas yang terdiri dari:**Rasio belanja rutin terhadap APBD**

= $\frac{\text{Total belanja rutin terhadap APBD}}{\text{Total APBD}}$ (4)

Rasio belanja pembangunan terhadap APBD

= $\frac{\text{Total belanja pembangunan terhadap APBD}}{\text{Total APBD}}$ (5)

Rasio pertumbuhan, yaitu dengan cara menghitung:**Persentase pertumbuhan PAD**

= $\frac{\text{PAD tahun p} - \text{PAD tahun p-1}}{\text{PAD tahun p-1}} \times 100$ (6)

Persentase pertumbuhan total pendapatan

= $\frac{\text{Pendapatan tahun p} - \text{Pendapatan tahun p-1}}{\text{Pendapatan tahun p-1}} \times 100$ (7)

Persentase pertumbuhan belanja rutin daerah

= $\frac{\text{Belanja rutin tahun p} - \text{Belanja rutin tahun p-1}}{\text{Belanja rutin tahun p-1}} \times 100$ (8)

Persentase pertumbuhan belanja pembangunan

= $\frac{\text{Blj pemb tahun p} - \text{Blj pemb tahun p-1}}{\text{Belanja pembangunan tahun p-1}} \times 100$ (9)

Teknik Pengumpulan Data

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Teknik penelitian ini menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh anggota kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Data yang dianalisis adalah bersumber dari kabupaten/kota di Bali yaitu 9 kabupaten/kota. Data yang diteliti merupakan data realisasi APBD serta PDRB dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dari dokumen laporan realisasi APBD serta PDRB yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id, dan (Badan Pusat Statistik) BPS dari masing-masing daerah kabupaten/kota.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif, dengan menjelaskan hasil dari perhitungan rasio dalam analisis kinerja keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Tingkat Kemandirian Daerah kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Bali merupakan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja daerahnya dari penghasilan daerahnya sendiri (PAD). Kemandirian keuangan daerah ini dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh besaran rasio KKD seperti tampak pada Tabel 1. berikut ini :

Tabel 1. Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota Provinsi Bali (2011-2016) (dalam %)

Kabupaten/Kota	Rasio Kemandirian					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
JEMBRANA	9.16	11.16	10.71	11.93	12.77	12.32
TABANAN	20.67	21.02	25.04	26.66	30.31	22.86
BADUNG	283.38	298.64	462.99	616.50	738.63	448.21
GIANYAR	29.32	35.50	34.88	45.63	55.60	46.40
KLUNGKUNG	8.77	8.09	9.56	13.12	16.07	13.46
BANGLI	5.73	6.83	8.21	10.06	14.29	11.90
KARANGASEM	11.57	21.57	21.93	22.80	28.27	18.56
BULELENG	12.89	14.04	14.12	18.39	22.71	20.05
DENPASAR	43.85	57.40	78.14	85.32	97.00	65.80

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan pada Tabel 1. dapat diketahui bahwa pada periode tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2016 menunjukkan persentase tingkat kemandirian yang terus meningkat setiap tahunnya. Dari semua kabupaten/kota di Provinsi Bali, hanya Kabupaten Badung yang sudah mandiri dan tidak lagi tergantung dari pemerintah pusat karena memiliki rasio kemandirian lebih dari 100%, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat, walau mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2016. Ini mengartikan bahwa tingkat kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Bali mulai meningkat sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat mulai menurun. Pada Tabel 1 terlihat bahwa Kabupaten Bangli memiliki tingkat kemandirian terkecil, ini berarti Kabupaten Bangli merupakan kabupaten yang paling tergantung terhadap pemerintah pusat..

Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan pada Tabel 1 di atas, rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Bali selama periode tahun anggaran 2011-2016 adalah 75,76 % sehingga menurut klasifikasi kriteria penilaian tingkat kemandirian keuangan daerah maka Provinsi Bali memiliki tingkat Kemandirian tinggi dan masuk pola hubungan delegatif.

Tingkat Efektivitas Daerah kabupaten/Kota Provinsi Bali

Efektivitas keuangan daerah otonom merupakan kemampuan daerah tersebut dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang dianggarkan, yang diukur menggunakan rasio efektivitas keuangan daerah. Hasil perhitungan rasio efektivitas terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Rasio Efektivitas Kabupaten/Kota Provinsi Bali (2011-2016) (dalam %)

Kabupaten/Kota	Rasio Efektiiitas					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
JEMBRANA	114.02	91.00	125.03	136.04	134.60	135.06
TABANAN	128.02	133.69	139.73	128.41	123.38	135.05
BADUNG	151.95	141.58	121.57	123.87	116.25	124.20
GIANYAR	117.36	124.28	133.98	135.98	123.37	124.06
KLUNGKUNG	126.67	136.39	138.85	141.70	134.02	140.41
BANGLI	108.31	131.46	133.30	137.94	106.99	115.93
KARANGASEM	236.28	115.86	119.62	149.63	118.44	126.52
BULELENG	127.53	115.63	125.23	124.72	132.06	130.20
DENPASAR	182.54	145.05	128.44	114.50	113.94	131.89

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan rasio efektivitas pada Tabel 2. dapat diketahui bahwa pada periode tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2016 menunjukkan persentase efektivitas di kabupaten/kota Provinsi Bali berfluktuatif, tetapi dari semua kabupaten/kota di Provinsi Bali

memiliki rasio efektivitas diatas 100% yang mengartikan bahwa daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali Selama periode tahun anggaran 2011-2016 memiliki kecenderungan tingkat efektivitas dari pendapatan daerah sangat efektif dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 130,60 %. Pencapaian ini perlu diperhatikan dan dipertahankan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Tingkat Efisiensi Daerah kabupaten/Kota Provinsi Bali

Efisiensi keuangan daerah merupakan kemampuan daerah dalam mengukur pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Kemampuan daerah ini diukur menggunakan rasio efisiensi keuangan daerah. Hasil perhitungan rasio-rasio aktivitas terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Rasio Efisiensi Kabupaten/Kota Provinsi Bali (2011-2016) (dalam %)

Kabupaten/Kota	Rasio Efisiensi					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
JEMBRANA	103.92	98.00	103.73	104.71	102.03	102.87
TABANAN	100.44	99.13	104.53	102.54	101.87	102.71
BADUNG	117.72	112.19	107.23	105.61	108.37	109.26
GIANYAR	92.29	105.94	104.73	103.40	101.55	102.39
KLUNGKUNG	101.66	98.55	106.89	105.61	101.82	102.66
BANGLI	102.17	105.15	107.65	104.10	97.08	97.88
KARANGASEM	102.40	96.20	96.58	107.19	101.16	102.00
BULELENG	101.60	106.49	98.39	99.01	103.85	104.70
DENPASAR	104.54	105.31	100.63	104.83	101.64	102.47

Sumber : Olah Data

Selama periode tahun anggaran 2011-2016, tingkat efisiensi dari belanja daerah Provinsi Bali memiliki kecenderungan **Tidak Efisien**, dengan tingkat efisiensi di atas 100 %, yaitu **103,1** % Kecenderungan yang tidak efisien pada dasarnya adalah suatu pemborosan, dimana dalam memperhitungkan alokasi fiskal yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintahan daerah tidak cermat dalam mengkalkulasi kapasitas fiskal daerah serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal.

Tingkat Aktivitas (Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan) Daerah kabupaten/Kota Provinsi Bali

Aktivitas keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah yang menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Kemampuan daerah ini diukur menggunakan rasio aktivitas belanja rutin untuk menggambarkan aktivitas keuangan daerah dalam hal pembelanjaan pada belanja tak langsung, subsidi, hibah, sosial dan belanja pegawai langsung. Sedangkan Rasio Aktivitas belanja pembangunan menggambarkan kemampuan dalam pembelanjaan pembangunan daerah.. Hasil perhitungan rasio efisiensi terlihat pada tabel dibawah ini..

Tabel 4. Rasio Aktivitas Belanja Rutin Kabupaten/Kota Provinsi Bali (2011-2016) (dalam %)

Kabupaten/Kota	Rasio Aktivitas (Belanja Rutin)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
JEMBRANA	88.55	80.12	79.05	78.58	79.35	70.34
TABANAN	90.13	75.29	85.49	85.97	87.77	78.95
BADUNG	81.73	62.11	62.20	64.28	60.79	58.30
GIANYAR	86.92	74.38	82.32	84.34	84.05	76.45
KLUNGKUNG	90.41	74.70	87.31	88.53	85.78	76.10
BANGLI	80.84	76.24	86.03	88.69	90.59	76.79
KARANGASEM	88.59	75.41	84.07	82.61	83.55	78.63
BULELENG	89.20	80.24	87.31	85.66	83.74	77.10
DENPASAR	96.54	80.34	82.04	81.16	83.42	79.05

Sumber : Data Diolah

Tabel 5. Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan Kabupaten/Kota Provinsi Bali (2011-2016) (%)

Kabupaten/Kota	Rasio Aktivitas (Belanja Pembangunan)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
JEMBRANA	17.22	17.42	18.14	19.20	17.96	23.92
TABANAN	9.94	14.12	11.22	9.77	5.67	11.66
BADUNG	13.41	22.73	35.78	35.58	30.43	30.09
GIANYAR	14.10	13.74	16.45	16.92	14.27	28.39
KLUNGKUNG	18.21	17.01	13.51	13.22	14.98	19.84
BANGLI	21.20	14.77	8.46	9.54	11.58	22.04
KARANGASEM	14.03	27.20	18.29	14.33	9.55	13.77
BULELENG	13.89	11.49	15.64	17.80	14.01	14.71
DENPASAR	6.34	18.94	19.52	18.48	12.16	14.23

Sumber : Data Diolah

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa rasio aktivitas belanja rutin kabupaten/kota Provinsi Bali rata-rata mengalami penurunan walau sempat mengalami peningkatan di tahun 2013 tetapi tahun berikutnya mengalami penurunan lagi. Keadaan berbeda diperlihatkan pada Tabel 5. Pada tahun 2012 meningkat tetapi menurun sampai pada 2015 dengan penurunan yang sangat signifikan. Tahun 2016 rasio aktivitas belanja pembangunan mengalami peningkatan yang sangat tajam. Hasil ini memperlihatkan bahwa di daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali terdapat peningkatan aktivitas pembangunan dan ini sangat mendukung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menambah pembangunan infrastruktur ke arah yang lebih baik. Sedangkan aktivitas belanja rutin yang terdiri dari belanja tak langsung, belanja hibah, belanja subsidi, belanja sosial, belanja pegawai langsung, serta belanja barang dan jasa mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2011-2016 lebih terkonsentrasi pada pembangunan daerahnya masing-masing.

Tingkat Pertumbuhan (PAD, Total Pendapatan, Belanja Rutin, dan Belanja Pembangunan) Daerah kabupaten/Kota Provinsi Bali

Pertumbuhan keuangan daerah merupakan kemampuan daerah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, total pendapatan, serta menggambarkan pertumbuhan dari belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Semakin tinggi persentase PAD dan Pendapatan, seharusnya diikuti dengan peningkatan pertumbuhan dari belanja rutin dan pembangunan, karena dana yang diterima dari PAD dan Pendapatan pemerintah daerah dapat teralokasikan dengan baik ke pengeluaran (belanja rutin maupun belanja pembangunan) secara maksimal (Dwirandra, 2008). Hasil perhitungan rasio-rasio pertumbuhan terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota Provinsi Bali (2011-2016) (dalam %)

Kabupaten/Kota	Rasio Pertumbuhan (PAD)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
JEMBRANA	64.25	40.88	7.26	19.91	10.89	21.16
TABANAN	17.60	24.44	33.33	16.48	14.49	11.07
BADUNG	7.85	42.73	41.93	17.24	17.47	13.79
GIANYAR	16.84	40.74	13.50	30.85	18.75	20.90
KLUNGKUNG	11.53	10.71	36.34	43.69	28.41	16.04
BANGLI	24.71	46.23	35.48	31.43	48.55	12.20
KARANGASEM	14.69	126.71	13.42	13.49	28.29	13.80
BULELENG	22.94	30.34	14.73	37.60	25.99	23.30
DENPASAR	9.30	51.42	45.54	18.95	11.63	5.02

Sumber : Data Diolah

Tabel 7. Rasio Pertumbuhan Total Kabupaten/Kota Provinsi Bali (2011-2016) (dalam %)

Kabupaten/Kota	Rasio Pertumbuhan (Total Pendapatan)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
JEMBRANA	30.54	8.77	13.97	10.45	9.19	26.16
TABANAN	16.09	25.79	16.13	13.52	11.44	29.98
BADUNG	8.94	49.37	28.90	12.43	15.92	17.91
GIANYAR	21.35	20.65	14.10	6.79	12.81	21.16
KLUNGKUNG	13.13	22.03	10.59	8.76	25.69	25.98
BANGLI	21.06	9.17	15.15	10.48	14.47	24.78
KARANGASEM	13.85	25.59	14.27	16.62	9.83	44.11
BULELENG	26.43	17.91	15.06	14.10	13.65	24.80
DENPASAR	12.85	22.54	11.26	14.76	17.57	16.73

Sumber : Data Diolah

Tabel 8. Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Kabupaten/Kota Provinsi Bali (2011-2016) (dalam %)

Kabupaten/Kota	Rasio Pertumbuhan (Belanja Rutin)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
JEMBRANA	28.68	-1.58	12.45	9.79	10.25	11.85
TABANAN	11.63	5.07	31.87	14.16	13.77	16.92
BADUNG	13.50	13.52	29.07	16.19	9.64	13.08
GIANYAR	35.80	3.25	26.27	9.41	12.43	10.19
KLUNGKUNG	3.82	0.83	29.25	10.29	21.79	11.76
BANGLI	7.33	2.96	29.93	13.90	16.92	5.77
KARANGASEM	18.39	6.91	27.39	14.59	11.07	35.63
BULELENG	19.14	6.07	25.20	11.94	11.11	14.91
DENPASAR	2.05	1.97	13.62	13.53	20.85	10.63

Sumber : Data Diolah

Tabel 9. Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan Kabupaten/Kota Provinsi Bali (2011-2016) (dalam %)

Kabupaten/Kota	Rasio Pertumbuhan (Belanja Pembangunan)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
JEMBRANA	49.86	10.08	18.68	16.89	2.10	68.05
TABANAN	151.68	78.80	-7.72	-1.22	-35.28	167.13
BADUNG	36.44	153.13	102.91	11.78	-0.85	16.60
GIANYAR	9.85	17.58	36.60	9.82	-4.80	140.93
KLUNGKUNG	104.27	14.01	-12.19	6.44	42.44	66.85
BANGLI	116.28	-23.93	-34.04	24.60	38.93	137.34
KARANGASEM	-0.32	143.55	-23.17	-8.65	-26.78	107.79
BULELENG	202.79	-2.43	56.59	29.83	-10.56	31.06
DENPASAR	-28.57	266.32	14.68	8.66	-22.63	36.53

Sumber : Data Diolah

Dari Tabel 6. terlihat bahwa seluruh kabupatn/kota di Provinsi Bali pada tahun 2012 mengalami peningkatan pertumbuhan PAD tetapi setelah tahun 2012 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari Tabel 7. terlihat bahwa kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2012 mengalami kenaikan tetapi setelah tahun tersebut mengalami penurunan total pendapatan yang signifikan. Tabel 8. Memperlihatkan pertumbuhan belanja rutin kabupaten/kota Provinsi Bali ditahun 2012 mengalami penurunan tetapi mengalami peningkatan ditahun 2013 tetapi menurun lagi sampai ditahun 2016. Tabel 9. memperlihatkan fluktuasi pertumbuhan belanja pembangunan di semua kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan belanja modal yang paling signifikan penurunannya adalah Kabupaten Bangli di tahun 2012. Dari hasil rasio pertumbuhan ini maka penurunan maupun peningkatan sumber pemasukan daerah yang tergambar pada rasio pertumbuhan PAD dan rasio pertumbuhan total pendapatan tidak terlalu mempengaruhi peningkatan maupun penurunan pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan, karena ketika rasio PAD dan rasio total pendapatan menurun, pemerintah daerah ternyata jurtru dapat meningkatkan rasio belanja pembangunannya dan menurunkan rasio

belanja rutinnya. Ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah fokus pada apa yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Bali :

- a. Rasio kemandirian mendapatkan bahwa tingkat kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Bali termasuk kategori dengan tingkat kemandirian tinggi dan masuk kategori delegatif.
- b. Rasio efektivitas mendapatkan bahwa tingkat efektivitas kabupaten/kota di Provinsi Bali masuk kategori sangat efektif.
- c. Rasio efesiensi mendapatkan bahwa tingkat efesiensi dari kabupaten/kota di Provinsi Bali tergolong tidak efisien.
- d. Rasio aktivitas belanja rutin dan rasio belanja pembangunan mendapatkan bahwa terdapat aktivitas yang berbeda pada kedua belanja pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Bali.
- e. Rasio Pertumbuhan PAD, Total Pendapatan, Belanja Rutin, dan Belanja Pembangunan menunjukkan bahwa Pertumbuhan PAD, total pendapatan, pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan mengalami peningkatan dan penurunan yang fluktuatif.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, saran-saran kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sebagai berikut.

- a) Untuk meningkatkan dan mempertahankan kemandirian keuangan daerah otonom. Kabupaten/Kota di Provinsi Bali lebih meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi yang dimiliki untuk meningkatkan PAD, karena kemandirian suatu daerah ditentukan oleh sejauh mana kontribusi pendapatan daerah terhadap total penerimaan sebagai sumber dalam pembangunan. Upaya yang dapat dilakukan adalah setiap Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dalam menyusun stiap potensi yang potensial yang dapat dikembangkan di masing-masing daerah.
- b) Tingkat efektivitas Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sudah sangat efektif dan perlu dipertahankan.
- c) Tingkat efisisensi keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tidak efisien dan sangat perlu diperbaiki dengan cara lebih cermat menghitung berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan serta memperhatikan jumlah pengangkatan pegawai dalam setiap periode sehingga tingkat efisiensi keuangan daerah dapat lebih efisien.
- d) Tingkat aktivitas belanja rutin dari tahun ke tahun diusahakan agar persentase semakin rendah dan tingkat aktivitas belanja pembangunan diusahakan persentase meningkat karena akan menunjukkan dalam memberikan pelayanan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelitian ini emnunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah sangat memperhatikan peningkatan pembangunan daerahnya, sehingga tingkat aktivitas ini perlu dijaga.
- e) Meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali perlu lebih memaksimalkan kinerjanya sehingga mampu menggali sumber-sumber pendapatan baru, misalnya melaksanakan ekstensivikasi dan intensivikasi terhadap pendapatan pajak di daerah, meingkatkan daya tarik investor untuk berinvestasi di daerahnya masing-masing, serta memaksimalkan retribusi pasar-pasar daerah.

DAFTAR RUJUKAN

Dollery, Brian. 2009. Local Government Reform and Local Government Finance. *Journal of New England University*.

- Dwirandra, A.A.N.B. 2008. Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2002-2006. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Erawati, Adi. 2012. Analisis Kinerja Kawasan Metropolitan Sarbagita. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Halim, A., 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Lucky D. 2013. Analysis Of The Effect Of Regional Financial Performance To Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure (Case study of 38 Regencies/Cities in East Java Province). *Journal of Economics and Sustainable Development*. ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online). Vol.4, No.19, 2013.
- Mardiasmo. 2005. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mbedzi E. And Gondo T. 2010. Fiscal Management In Dangila Municipality, Ethiopia. Performance And Policy Implications. Theoretical And Empirical Research In Urban Management. Number 5 (14). 95 – 119.
- Nasution, N. A., 2010. *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 36. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-undang RI No. 2 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.